Berperang Melawan Ilegalitas: Dilema Judi Online di Indonesia

“Peraturan dibuat untuk dilanggar”. Ini adalah pernyataan yang sering kita dengar, tiap kali kebijakan baru dibuat. Karena pada dasarnya, masyarakat cenderung untuk “membelot” ketika peraturan yang dibuat mulai bergesekan dengan kepentingan dan kesenangan pribadi. Seperti halnya dengan judi, yang sekarang sudah tak lagi menjadi tabu. Kegiatan ilegal ini kian kerap dilakukan masyarakat sebagai “jalan pintas” untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Sebuah hasrat yang ditentang keras di negara seribu mimpi, Indonesia. Kemudian muncul banyak pernyataan, apakah ini perbuatan yang “salah”? apakah ini telah melanggar norma dan agama?

“Apakah alasan “kebutuhan” dan “angan” untuk hidup lebih baik tidak bisa dijadikan pondasi lepasnya judi dari belenggu ilegalitas di Indonesia?”

Terkuaknya kasus seorang Inspektur Jenderal Polisi yang diduga memiliki “hubungan” dengan kepemilikan jaringan judi online di Indonesia menjadi hantaman yang sangat besar bagi Pemerintah. Oknum yang digadang-gadang sebagai pertahanan terdepan untuk memberantas ketabuan ini, ternyata ikut “bermain” di dalam jaringan pekat nan mengikat ini. Kasus ini adalah sebuah “kekecewaan” besar bagi Pemerintah dan sebuah “kelegaan” bagi masyarakat, karena “Mereka pun ikut bermain”.

Satu per satu tindakan keras diambil sebagai bentuk aksi “memberantas” kegiatan perjudian di Indonesia. Tindakan “baik” yang sudah kepalang tanggung dilakukan. Judi sudah sangat merakyat di Indonesia, tak tahu usia dan darimana, semuanya mengenal “baik” istilah ini. Walaupun demikian, tindakan baik dan normatif harus tetap didukung, semata-mata untuk mengembalikan “mahkota” negara pada tempat asalnya. Mungkin negara ini membutuhkan lebih banyak “Oknum Legal” yang terlibat agar bisa lebih cepat dalam bertindak, memberantas judi salah satunya.

Jika tindakan pemberantasan perjudian ini semakin kerap dilakukan, sebagai alih pemutihan nama “Pemerintah”, maka mungkin bisa ilegalitas perjudian juga dapat diperjuangkan. Banyak cerita, dalih dan kilah yang dapat diungkapkan, jika hanya sebuah validasi kepentingan”pribadi” yang dibutuhkan. Tetapi, dapatkah semua “alasan” ini nantinya dikuatkan dengan mempertimbangkan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat? Mungkin bisa, ketika sudah diketahui siapa yang memegang “palu” kebijakan. Jika alasan

Perjudian dianggap sebagai sebuah permainan. Permainan yang dianggap menyenangkan dan membawa kebersamaan. ‘Permainan” ini tidak mengindahkan siapa menang dan kalah, tetapi canda-tawa yang tercipta ketika memainkannya.

Perjudian dianggap sebagai solusi alternatif dalam membantu pereknomian keluarga. Di beberapa kasus, dengan modal yang kecil, orang-orang juga bisa “hoki”. Uang yang dihasilkan dari “hoki” digunakan untuk menambah modal usaha. Paling sederhana untuk membeli beras dan “make up” istri di rumah.

Perjudian dianggap sebagai sumber penghasilan utama. Walaupun diketahui bahwa judi adalah hal yang “tabu” dan “illegal”, beberapa orang memutuskan untuk menutup mata, Bekerja di dunia “perjudian” menjadi salah satu opsi yang banyak diambil oleh anak muda dengan alasan “jumlah pendapatan” dan kebutuhan ekonomi keluarga. Seperti halnya permainan judi online yang sangat berkembang saat ini. Berkembangnya jenis “bisnis” ini memberikan banyak peluang kerja bagi anak muda. Jumlah lulusan

sekolah dan universitas yang semakin bertambah dan jumlah partumbuhan lowongan pekerjaan yang terbatas tak mampu menampung hasrat ingin bekerja bagi banyak orang. Apalagi sambil menunggu janji, rencana dan mimpi manis Pemerintah yang terkesan “lambat” untuk direalisasikan. Masalahnya, rasa lapar dan haus tidak bisa ditunda 1 atau 2 hari, bahkan minggu dan bulan. Bukannya menyalahkan si pembuat kebijakan, tetapi proses yang berlapis dan kebutuhan untuk memuaskan “kepentingan pribadi” oknum yang terlibat membuatnya semakin tidak terlihat.

“Sebuah bisnis tercipta karena ada pasarnya. judi online berkembang karena banyak peminatnya”. Semakin banyak lowongan pekerjaan tercipta untuk mereka yang sudah lelah berusaha mengais remah program pemerintah. Saat ini, sudah diketahui salah satu solusinya, sayangnya pekerjaan ini adalah “pali” bagi Indonesia.

Yang mana yang harus dipilih? Apakah mimpi “hidup lebih baik” harus dikesampingkan dengan alasan moral? Apakah kebutuhan tidak lebih penting dari norma? Apakah pernyataan “Saya sebenarnya tidak mau, tapi tidak ada pilihan lagi. Keadaan memaksa saya seperti ini” tidak memiliki nilai “moral” yang cukup penting bagi pemangku kebijakan? Jika memang ada “pilihan” lainnya, seberapa banyakkah “pilihan” tersebut? dan sampai kapan “kebenaran” akan diputih-hitamkan di negeri ini?